ABSTRAK

Nanik Ratri Robiyah, 17102153050, 2019, Pertimbangan Hakim Dalam PenyelesaianSengketa Harta Bersama Antara Suami Dan Istri Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Trenggalek (Studi Putusan Perkara No. 0950/Pdt.G/2018/Pa.Tl), Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, Pembimbing Indri Hadisiswati, S.H.,M.H

Kata Kunci: Penyelesaian, Harta Bersama, Perceraian

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sengketa pembagian harta bersama yang sering kali menjadi permasalahan baru setelah perceraian karena ketidakadilan dalam pembagiannya. Pembagian harta bersama dalam perkawinan perlu didasarkan pada aspek keadilan untuk semua pihak, keadilan yang dimaksud mencakup pengertian bahwa pembagian tersebut tidak mendiskriminasikan salah satu pihak. Kepentingan masing-masing perlu diakomodasi asalkan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Sebagaimana dengan hal tersebut penulis meneliti mengenai Putusan Nomor: 0950/Pdt.G/2018/PA.TL di Pengadilan Agama Trenggalek dimana suami berpoligami dan akhirnya memilih bercerai dengan istri pertama, kemudian salah satu pihak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama untuk mendapatkan haknya dan keadilan dalam pembagian harta bersama.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis membuat rumusan masalah yaitu (1) bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama akibat perceraian Pengadilan Agama Trenggalek Nomor Perkara 0950/Pdt.G/2018/PA.TL? (2) bagaimana pandangan yuridis tentang putusan Hakim dalam perkara pembagian Harta Bersama Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL? (3) bagaimana pandangan Hukum Islam tentang putusan Hakim dalam Pembagian harta bersana Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui dan memahami pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL (2) untuk mengetahui dan memahami pandangan yuridis tentang putusan Hakim dalam perkara pembagian Harta Bersama Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL. (3) untuk mengetahui pandangan Hukum Islam tentang putusan Hakim dalam Pembagian harta bersana Nomor 0950/Pdt.G/2018/PA.TL

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan hukum positif dan hukum Islam. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Agama Trenggalek. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisisa data dianalisis secara deskriptif kemudian diuraikan dengan jelas melalui dari data-data hasil observasi, wawancara dan dokumentasi dengan majelis hakim yang mengadili perkara sengketa pembagian harta bersama dalam perceraian.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : (1)pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek, dalam memutus perkara pembagian harta

bersama yaitu Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf f KHI dan ketentuan Pasal 97 KHI Dalam pertimbangannya Majelis Hakim dalam hal ini menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat adalah sama besar yaitu memperoleh ½ (seperdua) bagian dari harta bersama obyek sengketa berupa tanah dan bangunan rumah dengan pertimbangan Suami dan istri sama-sama mencari nafkah selain itu pertimbangnnya lain selama dalam persidangan tidak ada yang mengajukan bukti adanya suatu perjanjian perkawinan yang dibuat Penggugat dan Tergugat baik sebelum maupun selama dalam ikatan perkawinan, hakim mengesampingkan gugatan yang bukti-buktinya kurang lengkap. (2) Dalam Hukum Positif, menurut pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa pembagian harta bersama karena perceraian yaitu dibagi setengah-setengah sesuai hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. selain itu tergugat juga berpoligami sehingga ada pemisahan harta selama pernikahan sebelum poligami dan sudah sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) huruf b UUP No. 1 Tahun 1974 "istri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan istri kedua dan berikutnya itu terjadi". (3) Dalam hukum Islam, dalam Al-Quran secara umum, suami yang berkerja dan bertanggaung jawab atas nafkah dan ekonomikeluarga.(QS. Ath Thalaq). Syariat tidak membagi harta gono-gini dengan bagian masing-masing secara pasti. Tidak ada nash yang mewajibkan baik dari al-Quran atau sunah. Harta bersama setelah perceraian dibagi dua,yakni setengah untuk suami dan setengan untuk istrisesuai pasal 97 Kompilasi Hukum Islam. dan pembagian harta dalam poligami harta bersama terpisah dan berdiri sendiri, yaitu tidak terjadi penggabungan atau campur aduk antara masing-masing harta bersama,

ABSTRACT

Nanik Ratri Robiyah, 17102153050, 2019, Judge Considerations in Settling the Distribution of Joint Property Disputes between Husband and Wife in Divorce Cases at Trenggalek Religious Court (Study of Decision Case No. 0950/Pdt.G/2018/Pa.Tl), Thesis, Department of Islamic Family Law, Faculty of Sharia and Law, Tulungagung State Islamic Institute, Advisor Indri Hadisiswati, SH, MH

Keywords: Settlement, Shared Assets, Divorce

This research is motivated by a dispute over the sharing of shared assets which is often a new problem after the divorce due to injustice in its distribution. The sharing of shared assets in marriage needs to be based on aspects of justice for all parties, justice in question includes the understanding that the division does not discriminate against one party. The interests of each need to be accommodated as long as it is in accordance with the actual reality. As with this matter, the author examines the Decision Number: 0950/Pdt.G/2018/Pa.TL in the Trenggalek Religious Court where the husband polygamy and finally chooses to divorce the first wife, then one party file a lawsuit to the Religious Court to get his rights and justice in the distribution of shared assets.

The formulation of the problem in this research are (1) what is the Judge's consideration in deciding the distribution of joint assets due to the divorce of the Trenggalek Religious Court Number Case 0950/Pdt.G/2018/PA.TL? (2) what is the juridical view of the Judge's decision in the case of the distribution of Joint Assets Number 0950/Pdt.G/2018/PA.TL? (3) what is the view of Islamic Law concerning the decision of the Judge in the Distribution of assets in number Number 0950/Pdt.G/2018/PA.TL. The objectives of this researchare (1) to know and understand the Judge's judgment in Decision Number 0950/Pdt.G/2018/PA.TL (2) to know and understand the juridical view of the Judge's decision in the case of the distribution of Joint Assets Number 0950/Pdt. G/2018/PA.TL. (3) to find out the views of Islamic Law concerning the Judge's decision in the distribution of property with assets Number 0950/Pdt.G/2018/PA.TL

This type of research is field research with a positive law and Islamic law approach. The location of this study was in the Trenggalek Religious Court. Data collection techniques in this study are by observation, interviews and documentation. The analysis technique of the data is analyzed descriptively and then clearly described through the data from the results of observations,

interviews and documentation with the panel of judges who tried the case of the dispute over the sharing of joint assets in the divorce.

The results of this research showed that: (1) consideration of the panel of judges of the Trenggalek Religious Court, in deciding the case for the distribution of joint assets, namely Article 35 paragraph (1) of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 1 letter f KHI and provisions of Article 97 KHI In its consideration, the Panel of Judges in this matter determined the Plaintiff and Defendant's part to be equal, namely obtaining ½ (one half) part of the assets together with the object of the dispute in the form of land and house with consideration of husband and wife together earning a living other than that other considerations during the trial no one submits evidence of a marriage agreement made by the Plaintiff and the Defendant either before or during the marriage bond, the judge overrides the claim that the evidence is incomplete. (2) In Positive Law, according to the judgment of the judge in deciding the case of the dispute over the distribution of shared assets due to divorce, which is divided in half according to the law stipulated in the Marriage Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. besides that the defendant also had polygamy so that there was a separation of property during the marriage before polygamy and was in accordance with Article 65 paragraph (1) letter b of UUP No. 1 of 1974 "the second wife and so on do not have the right to joint property that has existed before the marriage with the second and subsequent wives that occur". (3) In Islamic law, in the Koran in general, husbands work and are responsible for the family's economic livelihood. (QS. Ath Thalaq). Shari'a did not divide up the property without any definite parts. There is no obligatory text either from the Koran or the Sunnah. Shared assets after divorce are divided into two, namely half for husband and half for wife according to article 97 Compilation of Islamic Law. and the distribution of assets in separate and stand-alone polygamy assets, ie there is no merger or juxtaposition between each joint asset.

ملخص

نانيك راتري روبية ، ١٧١٠٢١٥٣٠٥٠ ،٢٠١٩ ، اعتبارات القاضي في تسوية نزاعات الملكية المشتركة بين الزوج والزوجة في قضية الطلاق في محكمة الدينية ترينجاليك (دراسة قضية القرار رقم ٠٩٥٠(Pa.Tl / 2018 / Pdt.G /، أطروحة ، قسم القانون الأسرة الإسلامية ، كلية الشريعة والقانون ، معهد تولونجاجونج الحكومي الإسلامي ، المستشار إندري هاديسسوتي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التسوية ، الأصول المشتركة ، الطلاق

هذا البحث هو الدافع وراء نزاع على تقاسم الأصول المشتركة والتي غالبا ما تكون مشكلة جديدة بعد الطلاق بسبب الظلم في توزيعها. يجب أن يستند تقاسم الأصول المشتركة في الزواج إلى جوانب العدالة لجميع الأطراف ، وتشمل العدالة المعنية فهم أن التقسيم لا يميز ضد طرف واحد. يجب استيعاب مصالح كل شخص طالما كان ذلك متوافقًا مع الواقع الفعلي. كما هو الحال في هذه المسألة ، يفحص صاحب البلاغ رقم القرار: ٠٩٥٠ / PA.TL / 2018 / Pdt.G في محكمة ترينجاليك الدينية حيث يختار الزوج تعدد الزوجات وأخيراً يطلِّق الزوجة الأولى ، ثم يرفع أحد الطرفين دعوى إلى المحكمة الدينية للحصول على حقوقه والعدالة في توزيع الأصول المشتركة.

بناءً على الخلفية أعلاه ، صاغ الباحثون مشكلة وهي (١) ما هو رأي القاضي في تقرير توزيع الأصول المشتركة بسبب الطلاق في قضية في محكمة الدينية ترينجاليك رقم٠٩٥٠ / Pdt.G / PA.TL / 2018؟ (٢) ما هي وجهة النظر القانونية لقرار القاضي في حالة توزيع الأصول المشتركة رقم ٠٩٥٠ PA.TL / 2018 / Pdt.G /؟ (٣) كيف ترى الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بقرار القاضي في توزيع الأصول في العدد رقم ٠٩٥٠ .PA.TL. / 2018 / Pdt.G / الغرض من هذه الدراسة هو (١) معرفة وفهم حكم القاضي في القرار رقم ٠٩٥٠PA.TL / 2018 / Pdt.G / (٢)لمعرفة وفهم وجهة النظر القانونية لقرار القاضي في حالة توزيع رقم الأصول المشتركة ٠٩٥٠ / PA.TL. / 2018 / Pdt. G(٣)لمعرفة آراء الشريعة الإسلامية بشأن قرار القاضي في توزيع الممتلكات ذات الأصول رقم ٠٩٥٠PA.TL / 2018 / Pdt.G /

هذا النوع من البحوث هو البحث الميداني مع نهج القانون الإيجابي والشريعة الإسلامية. كان موقع هذه الدراسة في محكمة ترينجاليك الدينية. تقنيات جمع البيانات في هذه الدراسة هي عن طريق الملاحظة والمقابلات والوثائق. يتم تحليل تقنية تحليل البيانات بشكل وصفي ومن ثم وصفها بوضوح من خلال البيانات من نتائج الملاحظات والمقابلات والوثائق مع لجنة القضاة الذين حاولوا قضية النزاع حول تقاسم الأصول المشتركة في الطلاق.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى ما يلي: (١) النظر في لجنة قضاة محكمة ترينجاليك الدينية ، عند البت في قضية توزيع الأصول المشتركة ، وهي الفقرة (١) من المادة ٣٥ من القانون رقم. ١ من ١٩٧٤ بشأن الزواج جو. المادة ١ - رسالة و KHI وأحكام المادة ٩٧ - المملكة العربية السعودية في نظرها ، حددت هيئة القضاة في هذا الشأن أن جزء المدعي والمدعى عليه متساو ، أي الحصول على جزء (نصف) من الأصول مع موضوع النزاع في شكل أرض ومنزل مع مراعاة الزوج والزوجة معًا. كسب لقمة العيش بخلاف تلك الاعتبارات الأخرى أثناء المحاكمة لا أحد يقدم أدلة على اتفاق الزواج الذي أدلى به المدعي والمدعى عليه إما قبل أو أثناء رباط الزواج ، القاضي يتجاهل الادعاء بأن الأدلة غير كاملة. (٢) في القانون الإيجابي ، وفقًا لحكم القاضي في البت في قضية النزاع على توزيع الأصول المشتركة بسبب الطلاق ، والتي تنقسم إلى النصف وفقًا للقانون المنصوص عليه في قانون الزواج رقم. ١ من ١٩٧٤ بشأن الزواج. إلى جانب أن المدعى عليه كان لديه أيضا تعدد الزوجات بحيث كان هناك فصل للممتلكات أثناء الزواج قبل تعدد الزوجات وكان وفقا للمادة ٦٥ الفقرة (١) حرف ب من UUPرقم ١ من عام ١٩٧٤ "الزوجة الثانية وما إلى ذلك ليس لها الحق في الملكية المشتركة التي كانت موجودة قبل الزواج مع الزوجات الثانية والزوجات اللاحقة التي تحدث". (٣) في الشريعة الإسلامية ، في القرآن بشكل عام ، يعمل الأزواج ويكونون مسؤولين عن سبل عيش الأسرة الاقتصادية (القرآن السورة الطلاق). لم تقسم الشريعة الممتلكات دون أي أجزاء محددة. لا يوجد نص إلزامي سواء من القرآن أو السنة. وتنقسم الأصول المشتركة بعد الطلاق إلى قسمين ، هما نصف الزوج ونصف الزوجة وفقًا للمادة ٩٧ ، تجميع الشريعة الإسلامية. وتوزيع الأصول في أصول متعددة الزوجات منفصلة وقائمة بذاتها ، أي لا يوجد اندماج أو تقاطع بين كل أصل مشترك.